

LAPORAN KEBERLANJUTAN PT BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI TAHUN 2024



**JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 10, MADUMULYO, PULISEN, KEC.BOYOLALI,
KAB BOYOLALI, JAWA TENGAH
57316**

DAFTAR ISI

	hal
I. STRATEGI KEBERLANJUTAN	1
II. IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN	1
A. KINERJA ASPEK EKONOMI	1
B. KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP	2
III. PROFIL SINGKAT PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI.....	2
A. VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA BERKELANJUTAN PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI.....	2
B. PROFIL PERUSAHAAN	3
IV. PENJELASAN DIREKSI	7
V. TATA KELOLA BERKELANJUTAN	8
VI. KINERJA BERKELANJUTAN	9
VII. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN.....	10



LAPORAN KEBERLANJUTAN
PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI
TAHUN 2024

I. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia berada di garis terdepan untuk menjadikan industri jasa keuangan lebih berwawasan lingkungan dan keberlanjutan, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Setelah itu terbit Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang berfokus untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerjasama dengan pihak lain.

PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri terus mengembangkan potensi sebagai wujud komitmen dalam menjalankan bisnis berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dengan adanya target prioritas yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) meliputi pengembangan kapasitas intern BPR serta pengembangan sumber daya manusia.

II. IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

A. KINERJA ASPEK EKONOMI

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia



KETERANGAN (dlm Jutaan Rupiah)	2024	2023	2022
Pendapatan Operasional	4.003	3.426	4.136
Total Kredit Yang Diberikan	18.752	18.321	14.906
Total Aset	30.150	28.620	26.360
Laba Tahun Berjalan	559	441	120

B. KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri telah mulai menerapkan pelestarian lingkungan hidup melalui

a. Efisiensi pemakaian kertas

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional BPR. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat- menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain-lain. BPR menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas dengan pemanfaatan kertas secara bolak balik. Dengan penghematan kertas, BPR berharap dapat turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

b. Efisiensi Listrik

BPR melakukan penghematan pemakaian listrik dengan memberlakukan pembatasan penggunaan listrik diatas pukul 17.00 WIB, AC dimatikan, dan seluruh ruangan yang tak terpakai lampu dimatikan.

c. Efisiensi Penggunaan Air

Efsiensi air adalah penggunaan air secara bijak dan hemat . Efsiensi air penting karena membantu menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan, mengurangi pencemaran lingkungan, dan



mengatasi dampak perubahan iklim dengan cara Memperbaiki kebocoran pipa dan toilet. Begitu juga dalam efisiensi air minum yang semula dengan penggunaan wadah minuman berbahan plastik/ kemasan dan saat ini telah dilakukan penurunan air minum kemasan oleh seluruh karyawan dengan membawa botol minuman/ tumbler dan mengisi air ulang pada tempat yang telah disediakan untuk mengurangi penggunaan air minum kemasan.

C. KINERJA ASPEK SOSIAL

- Komitmen Perusahaan

Komitmen Perusahaan PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat, dengan kantor kas di tiga tempat yaitu mangu, simo dan cepogo yang bisa mengakses masyarakat lebih luas

- Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) di Kabupaten Boyolali dengan tambahan fasilitas asuransi Kesehatan yaitu bpjs Kesehatan dan juga bpjs ketenagakerjaan, beserta jaminan pension untuk karyawan tetap.

III. PROFIL SINGKAT PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI

A. VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA BERKELANJUTAN PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI

1) Visi Keuangan Berkelanjutan

Menjadi BPR yang terpercaya dan profesional yang menjadi Mitra Usaha Nasabah yang saling menguntungkan

2) Misi Keuangan Berkelanjutan

- Memberikan Pelayanan Prima pada nasabah dengan menyediakan produk dan jasa keuangan sesuai keperluan



nasabah

- Memberikan pelayanan Jasa keuangan mikro kepada nasabah sebagai lembaga intermediasi dalam meningkatkan taraf hidup

B. PROFIL PERUSAHAAN

PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri berdiri dengan nama BPR Bali Pandanaran Mandiri Tahun 1992 dengan akta no. 314 Tanggal 17 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta,S.H. yang beralamat di Jl. Tanah Abang II Nomor 48 Jakarta 10160 yang merupakan BPR pola kerjasama antara Bank Bali dan KUD Mandiri yang saat itu KUD yang menjadi mitra Bank Bali adalah KUD Mojosongo, KUD Teras Selatan, KUD Banyudono Selatan, KUD Musuk dan KUD Nogosari.

BPR Bali Pandanaran Mandiri merupakan salah satu BPR Bali Group dimana jumlah BPR Bali berjumlah 18 BPR yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Saat terjadi banyak Merger Bank di Indonesia dan penggabungan Bank maka Bank Bali berubah nama menjadi Bank Permata maka BPR Bali Pandanaran Mandiri secara otomatis juga menjadi milik Bank Permata ,namun setelah Bank Permata Tbk diakuisisi oleh Standar Chartered Bank maka sesuai aturan yang berlaku bahwa BPR tidak boleh dimiliki oleh asing maka BPR Bali Pandanaran Mandiri dijual.

Pada tahun 2006 BPR Bali Pandanaran resmi dibeli oleh Kopkar PT. Bank Yudha Bhakti dengan akta Nomor 37 tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh notaris Agung Iriantoro, S.H. yang beralamat di Jl. Gading Bukit Indah Blok D16 Kelapa Gading Jakarta Utara dan beralih nama menjadi PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri.

Saat ini PT BPR Mitra Pandanaran mandiri sudah mempunyai 3 (tiga) kantor kas yaitu Kas Cepogo, Kas Simo dan Kas Mangu



IV. PENJELASAN DIREKSI

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai- nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Kebijakan mengenai aksi keuangan berkelanjutan merupakan hal baru yang dijalankan di Indonesia, sehingga masih banyak hal yang perlu dipelajari oleh PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri, baik dari sisi strategi maupun dalam penyesuaian pelaksanaan proses operasional. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri tentu saja terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dihadapi PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri dalam penerapan aksi keuangan berkelanjutan adalah terkait dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Masih perlunya pengembangan pengetahuan karyawan (SDM) PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri dalam penerapan aksi keuangan berkelanjutan.

V. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Tata Kelola yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) . Selain itu, GCG merupakan prinsip- prinsip yang



mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika perbankan.

Dalam penerapan good corporate governance, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (frame work) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (Governance Structure), Proses Tata Kelola (Governance Process) dan Hasil Tata Kelola (Governance Outcome). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
- b. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:



- a. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
- b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris
- c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada Dewan Komisaris.
- d. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di BPR
- e. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR PT Mitra Pandanaran Mandiri secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

VI. KINERJA KEBERLANJUTAN

Kinerja Keuangan

KETERANGAN (<i>dlm Jutaan Rupiah</i>)	2024	2023	2022
Total Aset	30.150	28.620	26.360
Total Kredit Yang Diberikan	18.752	18.321	14.906
Pendapatan Operasional	4.003	3.426	4.136
Beban Operasional	3.331	2.994	4.010
Dana Pihak Ketiga	18.868	17.933	17.836
Laba Tahun Berjalan	559	441	126



Pada tahun 2024 PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri belum memiliki Inovasi produk baru. Adapun produk yang saat ini ada adalah sebagai berikut;

a. Produk Tabungan

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - Tabungan Qurban | - Tabungan Simpel |
| - Tabungan Mapan | - Tabungan Unggul |
| - Tabungan Mandiri | - Tabungan Bersama |

b. Deposito

c. Kredit

Untuk produk kredit terdiri dari

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Konsumsi

Meskipun belum terdapat inovasi produk baru, namun produk tersebut telah bertahan dan memberikan dampak positif dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat daerah (UMKM).

PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri akan menyalurkan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri pada tahun pelaporan.



VII. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Atas pertimbangan tertentu mengingat ukuran dan kompleksitas usaha PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri yang masih terbatas maka BPR belum melakukan verifikasi tertulis dari pihak ketiga yang independen dikarenakan hal tersebut bukan merupakan persyaratan dari OJK. Namun demikian BPR menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual dan telah diverifikasi oleh pihak internal BPR.